

BKD Kota Depok Luncurkan Program Keringanan Pajak

DEPOK (IM) - Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok, Wahid Suryono mengajak masyarakat untuk memanfaatkan program pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua (BBNKB II) dan Gerakan Mengejar Puntang (Gempita) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

"Ini kesempatan baik dan hanya ada di tahun ini. Wajib pajak yang memiliki tunggakan dan utang pajak silakan memanfaatkan program ini, karena banyak insentif menarik," ujar Wahid di Kota Depok, Jawa Barat (Jabar), Rabu (23/11).

Menurut dia, denda sebelumnya bisa dihapuskan dengan catatan pajak tahun 2022 terbayarkan. Program tersebut sifatnya membantu dan memberikan stimulus untuk meringankan masyarakat. Kepatuhan masyarakat membayar pajak, bisa dinikmati melalui pembangunan daerah.

Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan Depok II

Samsat Cinere, Rina Parlina mengatakan, sosialisasi program pembebasan BBNKB II di Kota Depok kini menyorot tokoh agama dan tokoh masyarakat karena mereka adalah panutan. Dengan harapan, kesadaran Wajib Pajak (WP) timbul melalui panutan mereka," ujarnya.

Program itu digelar Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jabar yang digelar pada 1 November-23 Desember 2022. Menurut Rina, petugas juga menggandeng Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) untuk memberikan warna baru dan ikut mengajak Forum Kesatuan Umat Beragama (FKUB) dalam menyukseskan program tersebut.

"Kolaborasi dan sinergitas antara Samsat, Badan Keuangan Daerah (BKD) serta Bakesbangpol Depok harus terjalin kuat. Agar program yang digulirkan ke masyarakat dapat tersampaikan dengan baik," ujarnya. ● pp

SOAL DEBU BATU BARA

DLH Periksa 4 Cerobong Boiler Industri di KBN Marunda

JAKARTA (IM) - Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta menanggapi persoalan debu batu bara yang kembali mencemari Rusunawa Marunda, salah satunya dengan mengukur cerobong boiler pada empat industri atau perusahaan di Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Marunda, Jakarta Utara.

"Kami ukur cerobong-cerobong industri di sekitar Marunda," kata Kepala Seksi Humas Dinas LH DKI, Yogi Ikhwan saat dikonfirmasi, kemarin. Saat ditanya empat nama perusahaan terkait, Yogi masih enggan memberitahu. "Namanya dirahasiakan dulu," ucapnya.

Ia menduga, cerobong-cerobong industri pada empat perusahaan itulah yang mencemari warga Rusunawa Marunda. Sebab, keempat perusahaan itu masih menggunakan energi batu bara. "Iya (tenaganya masih pakai batu bara). Kami ukur cerobongnya. Ini yang pakai boiler batu bara. Jangan-jangan dari situ kan," tuturnya.

Sebelumnya, Ketua Forum Masyarakat Rusunawa Marunda (FMRM) Didi Suwandi melaporkan debu batu bara kembali mencemari Rusunawa Marunda pada Senin (21/11). "Berdasarkan laporan masyarakat dan teman-teman FMRM di lapangan, memang hari ini ditemukan debu batu bara agak berbeda, sedikit licin yang kemungkinan ditengarai bisa jadi bukan hanya dari penumpukan saja," kata Didi dalam keterangannya.

"Bisa saja dari yang lain, kemungkinan dari cerobong di wilayah KBN," imbuh Didi.

Warga Rusunawa Marunda, lanjut Didi, sangat kecewa dengan Dinas LH DKI dan Suku Dinas LH Jakarta Utara yang sangat lambat melakukan tindakan pencegahan. "Kami lihat belum ada progres signifikan usai dicabutnya izin lingkungan PT KCN bahkan kecenderungan debit debu batu bara yang kerap ada, mirip sebelum terjadi penutupan PT KCN," tukasnya. ● yan

Anggota DPRD DKI Jakarta Dinilai Kurang Disiplin, Rapat Bamus Molor

JAKARTA (IM) - Anggota DPRD DKI Jakarta dinilai kurang disiplin dalam bekerja. Akibatnya, rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD molor hingga dua jam.

Berdasarkan pantauan di lapangan, sejak pukul 09.00 WIB terlihat ruang rapat masih sepi dan hanya segelintir anggota DPRD DKI yang telah memasuki ruangan rapat. Terlihat kondisi tersebut berlangsung selama 2 jam lamanya. Rapat dimulai sekitar pukul 11.00.

"Ini keprihatinan kita bersama, padahal yang paling berharga adalah waktu, tetapi belum ada komitmen bersama mengenai waktu," kata Wakil Ketua Bamus DPRD DKI, Khoirudin di ruang rapat Bamus DPRD DKI, gedung DPRD, Jakarta, Rabu (23/11).

Wakil Ketua DPRD DKI tersebut menambahkan hingga saat ini belum ada tindakan yang tegas dari Badan Kehormatan (BK) terhadap para anggota dewan yang sering datang telat dan tidak hadir. "Saya pikir BK perlu

bertindak tegas untuk menegur para anggota yang tidak konsisten dengan waktu," tuturnya.

Khoirudin menambahkan perlu adanya mekanisme dari para anggota DPRD DKI terhadap permasalahan tersebut. Diketahui, rapat yang diadakan di DPRD DKI Jakarta tidak pernah berlangsung tepat waktu dan selalu molor atau telat.

"Perlu ada mekanisme dari kami dewan terhadap para anggota yang kurang disiplin. Ini merugikan kita semua," imbuhnya.

Dia mengatakan belum ada komitmen bersama yang disepakati untuk menghadiri rapat. Hal itu yang dinilai menjadi penyebab ketidakhadiran anggota dalam rapat.

"Harus ada komitmen bersama yang digaungkan dan dikontrol oleh BK," ucapnya.

Mengenai sanksi ataupun teguran, dia menyatakan hingga saat ini belum pernah ada upaya yang dilakukan. "Teguran dan sanksi seharusnya dari BK," tambahnya. ● yan

PENGUMUMAN

Berdasarkan Berita Acara Rapat Nomor 07, Tanggal 07 Nopember 2022 dibuat oleh Notaris Elok Kurniati,SH, 100% pemegang saham PT. BUANA MITRA ABIMANYU di Kabupaten Bekasi dan alamat : Perumahan Pondok Afi 2 Jalan Cempaka Blok J 5 Nomor 3, Desa Kedung Pengawas, Kec. Babelan, Kabupaten Bekasi, telah menyetujui dan memutuskan membubarkan Perseroan dengan menunjuk Direktur sebagai Ketua Tim Likuidator Perseroan. Hp : Bapak Rangga 081413189278.

Untuk pihak-pihak yang berkepentingan dapat menghubungi Tim Likuidator Perseroan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak tanggal diterbitkannya pengumuman ini.

Bekasi, 22 Nopember 2022
Tim Likuidator
PT. BUANA MITRA ABIMANYU

4 | Metropolis

FOTO/ANT



ANTISIPASI LONJAKAN KASUS COVID

Dinkes DKI Jakarta Siapkan Ketersediaan Tempat Tidur RS

Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Widyastuti mengatakan, saat ini tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit (BOR) di Jakarta dalam kisaran 20 hingga 25 persen. Dia berharap kenaikan angka Covid-19 tidak terjadi pada waktu-waktu tersebut.

JAKARTA (IM) - Dinas Kesehatan DKI Jakarta mengantisipasi kenaikan jumlah pasien terpapar Covid-19 pada akhir November atau awal Desember 2022. Langkah antisipasi dengan mempersiapkan ketersediaan tempat tidur di rumah-rumah sakit.

"Untuk Natal dan tahun baru, kami telah melihat, membandingkan, menganalisis tren dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan bagaimana risiko penyebabnya," kata Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes)

DKI Jakarta, Widyastuti di Jakarta, Rabu (23/11).

Widyastuti mengatakan, saat ini tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit (BOR) di Jakarta dalam kisaran 20 hingga 25 persen. Dia berharap kenaikan angka Covid-19 tidak terjadi pada waktu-waktu tersebut.

"Untuk prediksi akan terjadi puncak kasus pada akhir November atau awal Desember, tetapi tentu kita berharap itu tidak terjadi dan akan dihindari dengan ber-

bagai upaya," ungkapnya.

Dalam hal ini, Widyastuti berharap agar masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan (prokes). "Kami tetap mengimbau protokol kesehatan tetap dijaga, memakai masker terutama di tempat tertutup," katanya.

Selain itu, ia juga meminta masyarakat untuk tetap waspada dengan menerapkan protokol kesehatan meski status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jakarta level 1.

"Tentu peran media sangat strategis dan penting untuk mengedukasi warga untuk menjaga prokes dan pastikan kita terlindungi dengan vaksinasi," katanya.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan DKI, kasus aktif Covid-19 di Jakarta yang dirawat sebanyak 23.614 kasus. Kemudian kasus sembuh mencapai 1.459.200 sejak awal kemunculan Covid-19.

Adapun, berdasarkan data Kementerian Kesehatan, total jumlah orang yang sudah divaksinasi Covid-19 dosis pertama di Jakarta hingga 22 November 2022 mencapai 12.692.560 orang. Dosis kedua mencapai 10.831.326 orang dan dosis ketiga mencapai 5.205.596 orang. Untuk jumlah orang yang divaksinasi tiga (booster) per hari sebanyak 3.900 orang.

Awal Desember

Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta memprediksi puncak kasus Covid-19 pada akhir November atau awal Desember 2022 mendatang.

"Untuk prediksi memang akan terjadi puncak kasus ini (Covid-19) di akhir November atau awal Desember," kata Widyastuti.

Widyastuti mengimbau masyarakat agar tetap mematuhi protokol kesehatan hingga memastikan sudah terlindungi

WAKSIN ZIFIVAX MULAI DIGUNAKAN DI JAKARTA

Vaksinasi dari Kesdam Jaya menyuntikkan vaksin COVID-19 Zifivax saat diberlangsungnya vaksinasi di Taman Lapangan Banteng, Jakarta, Rabu (23/11). Pemrov DKI Jakarta menerima 49.120 dosis vaksin Zifivax dari Kementerian Kesehatan yang bisa digunakan untuk vaksinasi dosis ketiga atau booster bagi yang sebelumnya menggunakan vaksin Sinovac dan Sinopharm yang tersedia di 44 puskesmas kecamatan di Jakarta dan Taman Lapangan Banteng.

Pemprov DKI Mulai Perbaiki JIC

JAKARTA (IM) - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai memperbaiki Masjid Raya Jakarta Islamic Center (JIC). Perbaikan dimulai dengan mengkaji dampak kebakaran sejak garis polisi di tempat kejadian perkara (TKP) dilepas pada 7 November 2022 lalu.

"Saat ini sedang dikaji oleh Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta mengenai puing-puing kebakaran yang belum kami bersihkan karena menunggu keputusan," kata Kepala Sekretariat Pengelola Kawasan JIC, Zulkifli Said kepada wartawan di Jakarta Utara, Rabu (23/11).

Kalau itu (puing-puing)

masih merupakan aset, maka akan diselamatkan. "Kami simpan untuk dilelang. Kalau tidak, kami musnahkan," katanya.

Meski ada peristiwa kebakaran pada 19 Oktober lalu, menurut Zulkifli, semua aktivitas peribadatan di JIC terus berjalan sebagaimana biasa. "Shalat lima waktu dan Shalat Jumat kami laksanakan di aula pertemuan serbaguna (convention hall) JIC, juga kami sediakan tempat wudhunya," katanya.

Meski demikian, menurut Zulkifli, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI terus melakukan kajian dampak kebakaran satu bulan lalu. Perbaikan

diperkirakan bakal membutuhkan biaya cukup besar karena kerusakan bangunan agak parah.

Dia mengatakan, kalau dilihat sekilas yang terbakar hanya kubah. Tapi dampak runtuhnya kubah itu lantai dan bagian-bagian lain perlu mendapat kajian-kajian lebih lanjut untuk biaya perbaikannya.

Sampai saat ini, biaya perbaikan tersebut masih dihitung. Namun sebagai perbandingan, anggaran ketika awal Masjid Raya JIC dibangun pada 2001 mencapai Rp 160 miliar.

Biaya sebesar itu, kata Zulkifli, dikeluarkan 21 tahun lalu. Nantinya, biaya yang harus dikeluarkan untuk per-

baikan Masjid Raya JIC akan dikaji lebih mendalam oleh Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta.

Karena itu, Zulkifli belum mengetahui perkiraan biaya yang harus dikeluarkan, meskipun banyak bagian Masjid Raya JIC yang rusak. "Sekarang belum ada (nominal biaya perbaikan)," katanya.

Namun perbaikan fisik menjadi pertimbangan, kalau area lantai dua dan lantai pertama banyak bagian yang rusak dan mungkin menyebabkan adanya pergerakan material secara fisik.

Zulkifli memastikan Pemerintah Provinsi DKI

Jakarta terus melakukan monitoring ke JIC setiap pekan dan juga melangsungkan beberapa rapat mengenai kajian perbaikan masjid raya yang rusak. Karena itu, pihak pengelola baik manajemen JIC atau Sekretariat JIC tidak menerima sumbangan dana perbaikan dalam bentuk apapun. Semua mekanisme perbaikan nanti diatur oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Karena JIC milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Tentu kami sangat mengapresiasi keinginan berbagai pihak, dalam dan luar negeri, untuk berdonasi membangun (masjid raya) Jakarta Islamic Center kembali," katanya. ● yan

Pj Bupati Dani Ramdan Sarapan Pagi Bersama Tiga Pilar Se-Jabodetabek

FOTO : DOK.PIM PROKOPIM SETDAKAB BEKASI



Kegiatan Sarapan Bersama unsur Polri, TNI dan Pemerintahan se-Jabodetabek di halaman Monumen Nasional, Jakarta, Rabu (23/11).

JAKARTA (IM) - Guna memperkuat silaturahmi antara tiga pilar, Pj. Bupati Bekasi, Jawa Barat, Dani Ramdan, mengikuti kegiatan sarapan bersama unsur Polri, TNI, dan pemerintahan se-Jabodetabek. Kegiatan yang dilaksanakan di halaman Monumen Nasional, Jakarta, pada Rabu (23/11) tersebut, bertujuan untuk menjaga solidaritas serta menciptakan situasi ibu kota yang aman dan sejuk.

Pj. Bupati mengatakan, meskipun Kabupaten Bekasi secara administratif masuk dalam wilayah Provinsi Jawa Barat, tetapi ranah hukumnya masuk dalam wilayah Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya/Jayakarta yang merupakan wilayah ibu kota.

"Diharapkan kita bisa membangun silaturahmi antar pimpinan se-wilayah hukum Polda Metro Jaya, Kodam Jaya/Jayakarta dan juga Pj. Gubernur DKI Jakarta, meski secara administratif pemer-

intahannya masuk ke wilayah Jawa Barat," ujarnya dalam rilis Peokopim Setdakab Bekasi, Rabu (23/11).

Oleh sebab itu, menurutnya, kegiatan ini merupakan kesempatan yang baik bagi Pemkab Bekasi bersilaturahmi dengan jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk dapat mendukung terciptanya situasi yang kondusif di ibu kota melalui wilayah penyangganya.

"Karena teritorial TNI

dan Polri kita ada di Jakarta, kita juga perlu bersilaturahmi dengan jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta," lanjutnya.

Pada kegiatan tersebut, ia menyampaikan bahwa Kapolda Metro Jaya, Pangdam Jaya, serta Pj. Gubernur DKI Jakarta turut mendorong peran tiga pilar untuk meningkatkan ketertiban di tengah masyarakat, karena tiga pilar tersebut yang dapat mendeteksi dini serta melakukan langkah-langkah preventif apabila ada masalah ketertiban.

"Kapolda, Pangdam, dan Pj. Gubernur mendorong peran tiga pilar sebagai mata dan telinga pimpinan untuk

mengetahui dini dan melakukan langkah preventif dalam rangka peningkatan ketertiban di tengah masyarakat," tuturnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Pj. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Kapolda Metro Jaya Irfan Fadil Imran, Pangdam Jaya/Jayakarta Mayjen Untung Budiharto, Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol Gidion Arief Setyawan, Dandim 0509/Kabupaten Bekasi Letkol Inf. M. Horison Ramadhan, para Kepala Daerah, serta Kepala Desa/Lurah se-Jabodetabek. ● mdl

PENGUMUMAN

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 PP No. 15/1999 tentang Bentuk-bentuk Tagihan Tertentu yang dapat dikompensasikan sebagai Setoran Saham, Direksi PT Harmoni Adi Selaras, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat ("Perseroan"), dengan ini memberitahukan bahwa berdasarkan Akta No. 08 tanggal 22-11-2022, dibuat di hadapan Dery Aswin Tandoyo (Dery Tandoyo), S.H., M.Kn., Notaris di Kota Pontianak, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui diantarnya pelaksanaan konversi sebagian hutang Perseroan sebesar Rp409.610.112.500,- kepada PT HARITA JAYARAYA, berkedudukan di Jakarta Pusat, menjadi setoran modal dalam Perseroan.

Jakarta, 24 November 2022
(Direksi Perseroan)

PENGUMUMAN

PT PENGELOLA PUSAT BELANJA, berkedudukan di Jakarta Selatan, ("Perseroan"), dengan ini mengumumkan bahwa berdasarkan akta tertanggal 17 November 2022 Nomor 37, yang dibuat dihadapan Yulia SH, Notaris di Jakarta, telah dilakukan Konversi atas utang Perseroan kepada PT SYNTHESIS KARYA PRATAMA, berkedudukan di Jakarta Timur sebesar Rp. 4.800.000.000,- menjadi setoran modal dalam Perseroan.

Pengumuman ini disampaikan untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 15 Tahun 1999.

Jakarta, 24 November 2022

Direksi
PT PENGELOLA PUSAT BELANJA